

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Film adalah salah satu bahasa komunikasi yang paling mudah dipahami dan diminati banyak orang, melalui film penonton bisa memahami misi yang berusaha disampaikan film (Shaul, 2007). Pasal 1 UU No. 33 Tahun 2009 tentang perfilman menyebutkan bahwa film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan (UU 33 Tahun 2009, 2009).

Film sendiri merupakan industri dengan biaya besar yang berkaitan erat dengan sumber daya manusia baik yang terlibat dalam film atau menangani film dan juga menonton film. Para penggemar film memerlukan tempat untuk menonton film yang mana tempat itu juga menjadi sebuah usaha dengan keuntungan yaitu bioskop. Awal mulanya pengertian bioskop berasal dari kata *bio-scope* yang artinya gambar hidup sekarang lebih dikenal dengan nama film.

Pada saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda, tepatnya pada 5 Desember 1900, bioskop dengan bangunan sederhana menyerupai rumah sudah beroperasi. Pada masa tersebut usaha bioskop tidak menjanjikan banyak keuntungan sehingga banyak orang Belanda yang menekuni usaha tersebut memilih berhenti. Kemudian pada 1920-an usaha bioskop kebanyakan dimiliki oleh orang-orang Tionghoa yang memiliki persepsi bahwa bioskop merupakan investasi yang menjanjikan (Tjasmadi, 2008).

Indonesia sendiri memiliki sejarah panjang dalam dunia perfilman, 1927

disebut sebagai tahun pertama film dibuat di negeri ini dan bukan oleh orang Indonesia melainkan orang kulit putih bernama F. Carli dan Kruger (Said, 1991). Film-film sebelum 1927 diisi oleh film-film impor Amerika dan Mandarin, orang Cina menguasai perfilman pada saat itu di mana mereka berperan sebagai pemilik bioskop, pemodal dan penonton.

Film Indonesia sepanjang perjalanannya hingga kini banyak menuai kritik dari pengamat film dan jurnalis yang menilai masih banyak film nasional yang kurang memperhatikan estetika dan logika film melainkan mengedepankan sisi komersil. Persoalan mendasar lainnya adalah tontonan tradisional masyarakat Indonesia dahulu merupakan sandiwara yang berisi dongeng dengan efek haru atau lucu tidak berpijak pada suatu kondisi sosial tertentu juga logika (Kristanto, 2004).

Seiring berjalannya waktu film tidak hanya digunakan untuk kebutuhan komersil melainkan juga sebagai alat hegemoni seseorang yang berkuasa pada masanya tentu dengan melekatnya kebijakan-kebijakan yang terus berubah pada pemerintahan siapa yang berkuasa (Said, 1982).

Pada era Orde Lama politik perfilman dianggap kurang terarah karena berpindah dan banyaknya kementerian yang mengurus perfilman, pada awalnya berada dalam naungan Kementerian Dalam Negeri, lalu berpindah dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai akhirnya berada di Departemen Penerangan. Hal ini menyebabkan lambatnya segala urusan dalam perfilman. Dominasi kuat Partai Komunis Indonesia saat itu pada perfilman juga menjadi faktor lesunya perfilman Indonesia. Tercatat pada 1959 merupakan titik terendah di mana hanya 17 film yang berhasil diproduksi (Siagian, 2010).

Salah satu syarat pertumbuhan dari sebuah bangsa adalah kemampuan keluar

dari krisis yang terjadi. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto berlangsung sejak 1966-1998 dengan konsep Pembangunan berusaha keras memperbaiki perfilman Indonesia, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan *supply* kembali 300 film di bioskop pada 1967, hal ini dilakukan untuk mencegah gedung-gedung bioskop bekas menjadi tempat pertunjukkan ketoprak dan ludruk yang disinyalir bersifat indoktrinasi sisa-sisa gerakan politik PKI(Said, 1982).

Usaha memperbaiki perfilman Indonesia pemerintah Orde Baru mengalami kendala mengenai besarnya biaya produksi film, maka pada 3 Oktober 1966 Menteri Penerangan BM Diah membuka peluang luas masuk film impor sebanyak-banyaknya. Hal ini diatur sesuai keputusan Menteri Penerangan No.71/SK/M/1967 pada Desember 1967 mewajibkan importir film membeli saham dan rehabilitasi perfilman nasional seharga Rp. 250.000,00 untuk setiap 1 judul film yang mereka impor mulai Januari 1968.

Masalah baru muncul dengan maraknya film impor yang masuk ke Indonesia, yakni bagaimana film nasional bersaing dengan film impor dan sulitnya distribusi film di luar Jakarta sementara pengusaha bioskop membutuhkan suplai film yang tetap secara terus menerus agar berlanjutnya usaha bioskop mereka(Said, 1991). Sebab, jika bioskop berhenti mengadakan pertunjukan setidaknya ada 3 hal utama yang dikhawatirkan seperti hilangnya kepercayaan penonton, hilangnya antusiasme menonton juga memutus rantai hubungan pasar yang sudah tercipta(Tjasmadi, 2008).

Sejak diberlakukannya biaya film impor akibatnya produksi film dalam negeri meningkat dari tahun 1970-an tercatat sebanyak 607 film. Tahun 1970 film *Bernafas Dalam Lumpur* produksi Sarinade sangat sukses di pasaran dan dikatakan sebagai titik hidupnya kembali perfilman Indonesia awal dekade 1970.

Maraknya film-film impor dari *hollywood* dan negara lain mempengaruhi produksi film Indonesia, unsur kekerasan dan pornografi menjadi umum dan banyak beredar di film-film layar lebar Indonesia (Nugroho & Herlina, 2013). Hal ini juga dilakukan agar film Indonesia tidak kalah bersaing dengan film impor yang menjadi selera masyarakat.

Pornografi sendiri menurut undang-undang No. 44 tahun 2008 yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi dan gambar bergerak, animasi, kartun dan percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui media komunikasi atau di tempat umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan.

Sejak saat itu perfilman Indonesia mulai mengenal istilah *bomb seks* yaitu istilah untuk bintang film yang berani bermain dalam film seks seperti pada film *Gadis Panggilan* pada tahun 1975 yang diperankan oleh Yatie Octavia ditampilkan dalam keadaan telanjang, beberapa artis selain Yatie Octaviani yang mendapat julukan *bomb seks* adalah Eva Arnaz (*Midah Perawan Buronan*), Meriam Bellina (*Catatan Si Boy: Roro Mendut*), Debby Chintya Dewi (*Tiada Jalan Lain*), Doris Callebaut (*Inem Pelayan Sexi; Akibat Pergaulan Bebas*). Istilah bagi artis *bomb seks* juga muncul dari genre film horor seperti Suzzana yang dikenal sebagai *bomb seks* film horor.

Acara dengar pendapat yang dilaksanakan komisi 1 DPR dan BSF pada 23 November 1977 Soemarno selaku ketua BSF menjelaskan bahwa kriteria sensor selalu berubah mengikuti perkembangan jaman semisal sebuah film pada tahun 1950-an hanya bisa ditonton oleh 17 tahun keatas namun pada masa ini bisa ditonton oleh umur 13 tahun. Kriteria sensor Orde Baru hanya menekankan pada kestabilan negara

yakni tidak diperbolehkannya film dengan kritik sosial dan yang memicu konflik dalam masyarakat dan

Tahun 1977 pedoman sensor disahkan melalui SK menteri dan berlanjut disusun tahun 1980 oleh BSF sendiri. Sensor di Indonesia sendiri berdasar pada ordonansi Belanda tahun 1940 yang menguji film melalui 3 aspek: moral, keamanan publik, kemungkinan pengaruh buruk film tersebut. Kode Etik BSF tentang pengaturan sensor adegan seks dan kekerasan justru memang ada namun nyaris seluruh peraturan yang tercantum lebih berhubungan dengan keamanan negara dan pemimpin yang berkuasa.

Maraknya film-film dengan unsur pornografi pada Orde Baru tidak hanya dipengaruhi oleh film-film import dan longgarnya sensor terhadap adegan seks dan kekerasan, namun juga berjayanya film-film komersil atau film kelas B yaitu film yang dibuat dalam jumlah yang banyak guna menarik penonton dengan anggaran rendah berada dari sini berkembanglah film eksploitasi mereka hadir dalam bentuk vulgar seperti adegan kekerasan yang intens atau unsur pornografi seperti contoh film horor Suzzana (Imanjaya, 2016).

Umumnya cara presiden Soeharto melakukan import film ke Indonesia berhasil menaikkan pendapatan para pengusaha bioskop, adegan pornografi dan erotis pada era orde baru merupakan pemikat tersendiri bagi para penonton.

Perfilman Indonesia masa Orde Baru memang menarik untuk dibahas karena saat itu film Indonesia mengalami masa kejayaannya dalam gerak yang dibatasi. Penelitian yang sudah dilakukan antara lain yang berjudul “KEBIJAKAN PERFILMAN INDONESIA PADA MASA ORDE BARU (1967-1980)” karya

Yudi Sedio Utomo yang berfokus pada kebijakan perfilman Orde Baru dari segi hukum

dan undang-undang. Sedangkan penelitian ini berusaha mendeskripsikan pelaksanaan peraturan tersebut sudah sesuai atau tidak terhadap perfilman yang dibuat masa Orde Baru melalui satu isu perfilman yang banyak dibicarakan tentang Orde Baru yaitu maraknya unsur pornografi pada perfilman Orde Baru. Penelitian ini berjudul “SINEMATOGRAFI INDONESIA: UNSUR-UNSUR PORNOGRAFI PADA SINEMA INDONESIA MASA ORDE BARU TAHUN 1980- 1998”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

a. Pembatasan

Penelitian ini mengambil rentang waktu 1980-1998. Penelitian diawali pada dekade tahun 1980 saat puncak kejayaan perfilman di Era Orde Baru dengan jumlah produksi film yang terus tinggi dan stabil dan diakhiri pada tahun 1998 saat merosotnya produksi film nasional hingga hanya delapan film dalam kurun waktu dua tahun dikarenakan monopoli perfilman dan mulai maraknya video bajakan. Penelitian ini juga berfokus pada sinema layar lebar atau film bioskop.

b. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada pemikiran yang telah diuraikan di atas, permasalahan mendasar yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perfilman Indonesia pada era Orde Baru ?
2. Mengapa film dengan unsur pornografi marak dan bebas bermunculan di era Orde Baru khususnya tahun 1980-1998?
3. Bagaimana reaksi yang terjadi di masyarakat dengan maraknya unsur pornografi pada perfilman Indonesia di era Orde Baru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian guna mengetahui kondisi perfilman pada era Orde Baru yang cukup marak dengan unsur pornografi, serta melihat beragam reaksi baik dari tokoh dan organisasi agama atau masyarakat sendiri. Maraknya film-film dengan unsur pornografi yang tentu tidak cocok dengan ajaran beberapa agama yang ada di Indonesia dan dampak sosial apa yang terjadi pada masyarakat dengan maraknya film-film berunsur pornografi yang mana cukup diminati oleh masyarakat.

b. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Mampu memberikan sumbangan pengetahuan mengenai kondisi perfilman Indonesia pada era Orde Baru yang cukup kental dengan budaya barat
2. Mampu menjadi sumbangan mahasiswa program studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Metode dan Sumber Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti sejarah terdiri dari 4 tahap, yaitu : Heuristik, Verifikasi (kritik), Interpretasi dan Historiografi (penulisan sejarah) (Gottschalk, 1975).

Tahap pertama yang dilakukan penulis adalah heuristik atau pengumpulan data baik sumber primer maupun sekunder yang berkaitan dengan rumusan

masalah yang sudah dipaparkan oleh peneliti. Pengumpulan dan pencarian data yang dilakukan penulis berupa buku- buku sumber yang ada di Perpustakaan Nasional RI, Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Ruang baca prodi Pendidikan Sejarah dan juga Perpustakaan Gedung Pusat Perfilman H. Usmar Ismail atau biasa disebut juga dengan Sinematek, Penulis menemukan kliping, artikel-artikel terkait dan koran-koran cerita film- film era Orde Baru di Gedung Sinematek. Penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber orang-orang yang menekuni perfilman dan yang mengalami perfilman masa Orde Baru.

Tahap kedua yaitu verifikasi atau melakukan kritik pada sumber- sumber yang sudah dicari. Pada tahapan kedua dilakukan dua tahap yaitu kritik intern dan kritik ekstern guna menguji kredibilitas sumber-sumber yang telah didapatkan untuk penelitian. Kritik intern penulis melakukan uji kredibilitas terhadap teks dan terbitan dalam hal ini banyak dilakukan pada sumber buku. Sedangkan untuk kritik ekstern penulis melakukan analisis keaslian pada sumber meliputi tanggal, pengarang, stempel, tanda tangan.

Tahap ketiga penulis melakukan interpretasi terhadap fakta historis yang di dapat dari sumber-sumber yang sudah di verifikasi pada tahap kedua.

Tahap keempat dan terakhir yaitu historiografi atau penulisan sejarah. Model penulisan yang akan dipakai penulis adalah deskriptif- naratif dimana penulis memaparkan hasil penelitian secara lengkap dan sistematis.

b. Sumber Penelitian

Sumber penelitian yang digunakan terbagi menjadi 2 yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan arsip-arsip dan dokumen yang

peneliti dapatkan berisi mengenai informasi film-film dan arsip koran yang memuat berita mengenai film-film seperti koran Kompas dan koran Sinar Harapan. Adapun sumber primer ini penulis dapatkan di Perpustakaan Nasional RI Salemba dan Perpustakaan Gedung Sinematek.

Sumber sekunder penulis dapatkan dari literatur berupa buku-buku mengenai perfilman Indonesia dan era Orde Baru diantaranya yaitu buku karangan J.B Kristanto berjudul *Nonton Film Nonton Indonesia*, Salim Said berjudul *Pantulan layar putih & Dunia perfilman Indonesia*, H.M Johan Tjasmadi *100 Tahun Bioskop Indonesia*, Garin Nugroho dan Dyna Herlina *Krisis dan Paradoks Film Indonesia*, juga buku *Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA)* yang berkaitan dengan perfilman di Indonesia yang akan bertambah seiring berjalannya penelitian.

Penulis juga menonton beberapa film era Orde Baru yang berkaitan dengan judul penelitian yang diambil dan juga beberapa film propaganda seperti *G 30S PKI* dan masih akan terus bertambah seiring berjalannya penelitian.

E. Sistematika Penulisan

Penyajian hasil penelitian “Sinematografi Indonesia: Unsur-unsur pornografi pada sinema orde baru (1980-1998)” agar mudah dipahami dan memberi penggambaran dengan penelitian yang dilakukan.

BAB I PENDAHULUAN

- A. Dasar Pemikiran.
- B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

D. Metode dan Bahasa Sumber.

BAB II DUNIA PERFILMAN INDONESIA MASA ORDE BARU

- A. Perfilman Indonesia saat Orde Baru.
- B. Kemunculan *Cinepleks 21* dan Krisis Perfilman.
- C. Kebijakan dan sensor perfilman Indonesia saat Orde Baru.
- D. Unsur pornografi dalam perfilman Indonesia tahun 1980- 1998.

BAB III REAKSI TERHADAP UNSUR PORNOGRAFI PERFILMAN ORDE BARU

- A. Reaksi yang terjadi di Indonesia terkait maraknya unsur pornografi dalam perfilman Indonesia saat Orde Baru khususnya tahun 1980- 1998.
- B. Reaksi tokoh dan lembaga agama Indonesia terkait maraknya unsur pornografi dalam perfilman Indonesia saat Orde Baru.
- C. Pengaruh yang terjadi di masyarakat terkait maraknya film- film dengan unsur pornografi di era Orde Baru.

BAB IV KESIMPULAN